

## ABSTRAK

Pedagang kaki lima beroperasi di sektor yang tidak terorganisir dengan tujuan mencari nafkah untuk diri mereka sendiri. Sebagian PKL menggunakan pikulan, gerobak dorong, atau kendaraan bermotor, sedangkan sebagian lainnya lebih banyak berpindah-pindah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Pasal 9 huruf e Nomor 6 Tahun 2008, setiap pedagang kaki lima dilarang menggunakan kendaraan bermotor untuk keperluan usaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pasal 9 huruf e yang melarang setiap pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor diimplementasikan. Sumber data primer meliputi wawancara dan data sekunder dari kepustakaan, dan metodologi penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu implementasi Pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima belum terealisasi, karena instansi terkait tidak pernah melakukan penindakan kepada pelaku UMKM yang melanggar Pasal 9 huruf e. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi peraturan, baik karena kurangnya koordinasi, terbatasnya sumber daya, maupun kebijakan internal yang belum berpihak kepada UMKM. Keputusan untuk tidak menindak pelaku UMKM dapat mencerminkan bahwa struktur hukum memiliki kendala operasional atau kebijakan yang bertentangan dengan peraturan daerah.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Kendaraan Bermotor.

## **ABSTRACT**

*Street vendors operate in the unorganised sector to earn a living. Some street vendors use picnics, pushcarts or motorised vehicles, while others are more mobile. According to Jember Regency Regional Regulation Article 9 Letter e Number 6 Year 2008, every street vendor is prohibited from using motorised vehicles for business purposes. Based on Jember Regency Regional Regulation Number 6 of 2008 concerning street vendors, the purpose of this research is to find out how Article 9 letter e, which prohibits street vendors from conducting business activities using motorised vehicles, is implemented. The primary data sources include interviews and secondary data from the literature, and the research methodology uses empirical legal research with a legal and conceptual approach. Based on the findings of this study, the implementation of Article 9(e) of the Jember Regency Regional Regulation Number 6 of 2008 on Street Vendors has not been realised because the relevant authorities have never taken action against MSME actors who violate Article 9(e). This indicates a weakness in the implementation of regulations, either due to lack of coordination, limited resources or internal policies that are not in favour of MSMEs. The decision not to take action against MSME actors may reflect that the legal structure has operational constraints or policies that conflict with local regulations.*

**Keywords:** *Regional Regulations, Street Vendors, Motor Vehicles*